

ABSTRAK

Berakhirnya suatu harta bersama ditandai dengan selesai dibaginya harta bersama tersebut kepada mantan suami dan mantan isteri pasca putusnya perkawinan. Termasuk dalam pembagian tersebut adalah seluruh kekayaan, keuntungan, kerugian dan beban yang diperoleh selama jangka waktu perkawinan. Harta bersama sebagai suatu obyek dapat menjamin terlaksananya pemenuhan perikatan, karena harta bersama mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, maka dapat dijadikan jaminan dalam suatu akad kredit. Penelitian ini ingin membahas mengenai kedudukan harta bersama yang dijadikan objek jaminan Hak Tanggungan setelah perceraian dalam putusan Nomor 185/Pdt.G/2022/PA.Pwd dan peran lembaga peradilan dalam upaya menyelesaikan sengketa kedudukan harta bersama yang dijadikan jaminan Hak Tanggungan pasca perceraian.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dipakai adalah studi kepustakaan yang ditunjang dengan studi lapangan berupa wawancara dengan pihak terkait dan data yang diperoleh dianalisa secara analisa kualitatif.

Hasil penelitian menemukan bahwa kedudukan hukum yang sama antara tergugat dan penggugat terhadap harta bersama yang sederajat, timbul tanggung jawab suami istri, dan perbuatan hukum dilakukan bersama-sama atau salah seorang di antara mereka. Apabila terdapat salah satu pihak yang merasa apat mengajukan permohonan eksekusi, setelah pengajuan permohonan eksekusi pengadilan dapat melelang. Oleh karena itu, dianjurkan untuk suami dan istri agar segera melaksanakan pembagian harta bersama agar tidak merugikan hak orang lain.

Kata Kunci: Hak Tanggungan, Kedudukan Harta Bersama, Perceraian.

ABSTRACT

The end of a joint property is marked by the completion of the division of the joint property to the ex-husband and ex-wife after the breakup of marriage. Included in the division are all wealth, profits, losses and expenses acquired during the term of the marriage. Common property as an object can warrant the fulfillment of the agreement, because common property has high economic value, it can be used as collateral in a credit contract. This study wants to discuss the position of joint property that is used as the object of warrant of Dependent Rights after divorce in decision Number 185/Pdt.G/2022/PA. Pwd and the role of the judiciary in efforts to resolve disputes over the position of joint property that is used as collateral for post-divorce Dependent Rights.

The research method used is an empirical juridical approach with analytical descriptive research specifications. The data collection method used is a literature study supported by field studies in the form of interviews with related parties and the data obtained are analyzed by qualitative analysis.

The results of the study found that the equal legal position between the defendant and the plaintiff towards equal joint property, husband and wife responsibility arise, and legal actions are carried out jointly or one of them. If there is a party who feels unable to apply for execution, after filing the application for execution the court can auction. Therefore, it is recommended for husbands and wives to immediately carry out the division of joint property so as not to harm the rights of others.

Keywords: Liability, Position of Common Property, Divorce.